ANALISIS PERSEPSI ORANG TUA URBAN TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM VERIFIKASI USIA MEDIA SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI PP TUNAS DI JAKARTA

Bintang Fikri Andriansyah[1], Adis Saputra[2,] Amirul Jadid[3,] Fajar Ramdoni[4]
[1]Universitas Dian Nusantara
Alamat e-mail : [1] 211232064@mahasiswa.undira.ac.id,
Alamat e-mail : [2] 211232060@mahasiswa.undira.ac.id,

ABSTRACT

The increasing use of social media among Indonesian children has prompted the government to enact Government Regulation No. 17 of 2025 on Electronic System Governance for Child Protection (PP TUNAS). This study aims to analyze urban parents' perceptions of the effectiveness of social media age verification systems in the implementation of PP TUNAS.

This research employs a descriptive quantitative approach using secondary data from the 2026 EVIDENT Institute survey involving 1,050 urban parents. The analysis focuses on describing parents' knowledge, attitudes, and behaviors regarding child protection policies in digital environments.

The findings indicate that 96.1% of respondents support age restrictions on children's social media use. However, 59.3% believe that current age verification systems are ineffective, while 38% report that social media platforms do not provide clear age verification mechanisms. In addition, 24.2% of respondents are unaware of PP TUNAS or its implementation timeline. Although 91% of parents impose restrictions on gadget use and 83.6% regularly monitor their children's online activities, most respondents still emphasize the need for stronger support from both government and digital platforms.

The study concludes that the successful implementation of PP TUNAS requires more effective age verification systems, improved digital literacy, and stronger collaboration among government institutions, digital platforms, schools, and families.

Keywords: PP Tunas, Age Verification, Parental Perception, Social Media

ABSTRAK

Meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak-anak Indonesia mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi orang tua urban terhadap efektivitas sistem verifikasi usia media sosial dalam implementasi PP TUNAS.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari survei EVIDENT Institute tahun 2026 yang melibatkan 1.050 responden orang tua di wilayah perkotaan. Analisis dilakukan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua terhadap kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 96,1% responden mendukung pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak. Namun, 59,3% responden menilai sistem verifikasi usia yang diterapkan platform media sosial saat ini belum efektif, sementara 38% menyatakan platform tidak menyediakan mekanisme verifikasi usia yang jelas. Selain itu, 24,2% responden belum mengetahui keberadaan atau waktu berlakunya PP TUNAS. Meskipun 91% orang tua menerapkan pembatasan penggunaan gawai dan 83,6% rutin mengawasi aktivitas digital anak, mayoritas tetap memandang perlunya dukungan dari pemerintah dan platform digital.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PP TUNAS memerlukan sistem verifikasi usia yang lebih efektif, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, sekolah, dan keluarga.

Kata Kunci: PP Tunas, Verifikasi Usia, Persepsi Orang Tua, Sosial Media

A. Pendahuluan

Indonesia menghadapi paradoks digital yang akut: negara dengan lebih dari 212 juta pengguna internet aktif (We Are Social, 2025) sekaligus negara yang sebagian besar penggunanya adalah anak-anak dan remaja yang belum memiliki perlindungan digital yang memadai. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat paparan media sosial berlebihan pada anak terbukti berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis mereka. (Twenge & Campbell, 2019), dan laporan UNICEF Indonesia (2024) mengonfirmasi bahwa anak-anak Indonesia menghadapi peluang sekaligus ancaman yang semakin kompleks di ruang digital. (Bisnis et al., 2025) mencatat bahwa lebih dari 60% anak usia 5–24 tahun telah memiliki akun media sosial aktif, angka yang jauh melampaui kemampuan regulasi untuk mengimbanginya.

Respons negara atas kondisi ini diwujudkan melalui PP TUNAS (PP No. 17/2025), yang secara formal mewajibkan platform media sosial untuk menerapkan verifikasi usia, menonaktifkan akun anak di bawah batas minimum, serta menyediakan kontrol orang tua (*parental control*). Namun, survei (Eksekutif, 2025)terhadap 1.050 responden urban di Jakarta mengungkapkan bahwa 59,3% dari mereka menilai sistem verifikasi usia yang ada saat ini tidak efektif, dan 38% menyatakan platform tidak menyediakan fitur verifikasi yang jelas.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif PP TUNAS dan kapasitas teknis platform digital dalam menjalankan perlindungan anak. Sistem verifikasi usia yang masih bertumpu pada self-declaration memungkinkan pengguna di bawah umur memanipulasi identitasnya sehingga efektivitas pembatasan usia menjadi lemah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Eltaher & Miralles-pechuán, 2025) yang menemukan bahwa TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, dan X masih mengandalkan mekanisme verifikasi yang tidak memenuhi standar age assurance IEEE. Dengan demikian, tantangan implementasi PP TUNAS tidak hanya berada pada tingkat regulasi, tetapi juga pada kesiapan teknologi platform yang menjadi aktor utama perlindungan anak di ruang digital.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ia mencerminkan pengalaman riil jutaan orang tua yang setiap hari berjuang mengawasi anak-anaknya di ruang digital sebuah ruang yang desainnya tidak pernah dirancang untuk perlindungan, melainkan untuk keterlibatan (*engagement*) dan retensi pengguna (Fahrimal, 2018).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai perlindungan anak digital di Indonesia umumnya berfokus pada penggunaan media sosial, literasi digital, dampak paparan konten digital, serta kajian normatif mengenai kebijakan perlindungan anak. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi orang tua terhadap efektivitas sistem verifikasi usia media sosial dalam konteks implementasi PP TUNAS masih relatif terbatas. Padahal, persepsi orang tua merupakan aspek penting dalam menilai kesiapan masyarakat menerima dan mendukung kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis persepsi orang tua urban terhadap implementasi PP TUNAS dan efektivitas sistem verifikasi usia media sosial.

Dengan demikian, penelitian ini mengajukan pertanyaan: Bagaimana persepsi orang tua urban terhadap efektivitas sistem verifikasi usia media sosial, tingkat pemahaman kebijakan, dan upaya perlindungan anak dalam implementasi PP TUNAS di Jakarta?. Tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis persepsi orang tua urban terhadap efektivitas sistem verifikasi usia media sosial dalam implementasi PP TUNAS.
2. Menganalisis tingkat pemahaman orang tua terhadap kebijakan PP TUNAS sebagai upaya perlindungan anak di ruang digital.
3. Menganalisis bentuk pengawasan dan peran orang tua dalam mendukung perlindungan anak pada penggunaan media sosial.

B. Metode Penelitian

Studi ini mengaplikasikan pende katan kuantitatif dengan metode deskriptif dalam menganalis pandangan orangtua perkotaan meng enai penerapan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Policy Brief EVIDENT. Lembaga tahun 2026 yang melibatkan 1.050 responden orang tua di kawasan perkotaan Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi terhadap laporan penelitian, pengaturan, serta sumber-sumber literatur yang berkaitan.

Data dianalisis secara deskriptif dengan mengategorikan temuan berdasarkan dimensi. kognitif, emosional, dan konatif dalam teori pengamatan. Dimensi kognitif dimanfaatkan untuk menjabarkan sejauh mana pengetahuan dan pemahaman orang tua mengenai PP TUNAS, dimensi afektif berfungsi untuk mengenali sikap dan penilaian orang tua terhadap kebijakan tersebut, sementara dimensi konatif digunakan untuk mengamati kecenderungan tingkah laku atau peran orang tua dalam mendukung pelaksanaan perlindungan anak di ranah digital. Persepsi Individu bisa dianalisis melalui aspek kognisi, afeksi, dan konatif yang mencerminkan proses. pengertian, emosi, dan kecenderungan untuk bertindak terhadap sebuah objek atau fenomena tertentu.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat urban terhadap implementasi kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak melalui PP TUNAS. Data diperoleh dari survei terhadap 1.050 responden yang mayoritas berdomisili di DKI Jakarta, berjenis kelamin perempuan (67,4%), dan berusia 21–40 tahun. Survei ini menggambarkan pandangan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat paparan teknologi digital relatif tinggi.

Hasil survei menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pembatasan usia penggunaan media sosial sangat tinggi. Sebanyak 96,1% responden menyatakan mendukung kebijakan pembatasan usia media sosial bagi anak. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari adanya risiko yang dihadapi anak dalam ruang digital dan menganggap perlindungan digital sebagai kebutuhan yang mendesak.

Tingginya tingkat dukungan tersebut menunjukkan adanya legitimasi sosial yang kuat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, tantangan utama implementasi PP TUNAS bukan terletak pada penerimaan masyarakat, melainkan pada mekanisme penerapannya di tingkat platform digital dan institusi terkait.

Meskipun mayoritas responden mendukung pembatasan usia, sebanyak 59,3% responden menilai bahwa sistem verifikasi usia yang diterapkan platform media sosial saat ini belum efektif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi PP TUNAS tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesiapan teknis platform digital dalam menerapkan mekanisme perlindungan anak secara efektif. Sistem verifikasi usia yang masih bergantung pada deklarasi usia secara mandiri (self-declaration) memberikan peluang bagi pengguna di bawah umur untuk memanipulasi identitas mereka ketika membuat akun media sosial. Akibatnya, pembatasan usia yang secara normatif telah diatur dalam PP TUNAS belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi perlindungan yang nyata di tingkat operasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasi teknologi yang digunakan oleh platform digital.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif Surveillance Capitalism yang dikemukakan oleh Zuboff (2019). Dalam paradigma ini, platform digital pada dasarnya dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna (engagement) dan mempertahankan durasi penggunaan selama mungkin. Semakin banyak pengguna yang aktif, termasuk pengguna usia muda, maka semakin besar pula data perilaku yang dapat dikumpulkan dan dimonetisasi. Oleh karena itu, perlindungan anak sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam desain platform. Temuan bahwa mayoritas responden masih menilai sistem verifikasi usia belum efektif menunjukkan bahwa logika bisnis platform digital masih berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan anak yang diusung oleh PP TUNAS.

Selain itu, 38% responden menyatakan bahwa platform tidak menyediakan mekanisme verifikasi usia yang jelas, sedangkan 30,7%

menganggap proses verifikasi yang tersedia terlalu rumit. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dengan kesiapan teknis platform dalam mendukung perlindungan anak. Sistem yang masih bergantung pada deklarasi usia secara mandiri (self-declaration) dinilai rentan terhadap manipulasi sehingga tidak mampu menjamin efektivitas pembatasan usia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai PP TUNAS masih relatif rendah. Hanya 23,4% responden yang mengetahui secara tepat kapan aturan tersebut berlaku. Sebanyak 45% responden mengetahui keberadaan aturan namun tidak memahami detail implementasinya, sedangkan 24,2% responden sama sekali tidak mengetahui keberadaan aturan tersebut.

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai PP TUNAS menunjukkan bahwa proses komunikasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif komunikasi publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibuat, tetapi juga oleh efektivitas penyebaran informasi kepada kelompok sasaran. Tingginya dukungan masyarakat terhadap pembatasan usia media sosial menunjukkan bahwa substansi kebijakan memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Namun demikian, rendahnya tingkat pemahaman mengenai waktu berlaku dan mekanisme implementasi kebijakan mengindikasikan adanya kesenjangan informasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas implementasi karena masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, maupun tujuan dari kebijakan tersebut.

Data ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi kebijakan belum berjalan optimal. Rendahnya pemahaman publik berpotensi menghambat efektivitas implementasi karena kepatuhan sukarela masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan publik. Sebanyak 68,2% responden menyatakan bahwa sekolah pernah memberikan edukasi

mengenai bahaya media sosial bagi anak di bawah umur, sedangkan 31,8% lainnya mengaku belum pernah menerima edukasi tersebut.

Sekolah memiliki posisi strategis sebagai agen sosialisasi kebijakan sekaligus penyedia literasi digital bagi keluarga. Temuan bahwa masih terdapat 31,8% responden yang belum pernah menerima edukasi mengenai bahaya media sosial bagi anak menunjukkan bahwa distribusi informasi belum berjalan secara merata. Padahal, dalam konteks perlindungan anak di ruang digital, sekolah dapat berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, keluarga, dan peserta didik. Ketimpangan distribusi edukasi ini berpotensi menciptakan kesenjangan tingkat pemahaman masyarakat mengenai keamanan digital dan implementasi PP TUNAS.

Temuan ini menunjukkan bahwa sekolah telah berperan dalam memberikan edukasi digital, namun distribusi edukasi tersebut belum merata. Ketimpangan ini berpotensi menyebabkan perbedaan tingkat pemahaman mengenai keamanan digital di kalangan masyarakat. Mayoritas responden telah menerapkan berbagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Sebanyak 91% responden menerapkan pembatasan waktu penggunaan gadget, sedangkan 83,6% rutin memeriksa aktivitas digital anak. Selain itu, 81,4% mendukung kewajiban validasi usia sebagai syarat penggunaan media sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua telah menerapkan strategi mediasi yang sejalan dengan konsep restrictive mediation dalam Teori Parental Mediation. Strategi ini diwujudkan melalui pembatasan akses, pengawasan aktivitas digital, serta pengendalian durasi penggunaan media oleh anak. Namun demikian, tingginya tingkat pengawasan orang tua ternyata tidak diikuti dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keamanan platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keluarga memiliki keterbatasan dalam menghadapi kompleksitas ekosistem digital yang berkembang sangat cepat. Dengan kata lain, perlindungan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada keluarga, tetapi memerlukan dukungan dari platform digital dan pemerintah sebagai regulator.

Meskipun demikian, tingginya tingkat pengawasan orang tua tidak mengurangi dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua menyadari keterbatasan pengawasan keluarga dalam menghadapi kompleksitas risiko digital yang berkembang saat ini.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis persepsi orang tua urban terhadap efektivitas sistem verifikasi usia media sosial dalam implementasi PP TUNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan dukungan yang tinggi terhadap kebijakan perlindungan anak di ruang digital, yang tercermin dari tingginya persetujuan terhadap pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak. Namun, dukungan tersebut belum diikuti oleh tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap efektivitas sistem verifikasi usia yang diterapkan oleh platform digital saat ini.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua telah melakukan berbagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Meskipun demikian, pengawasan keluarga dinilai belum cukup untuk mengatasi kompleksitas risiko di ruang digital. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai implementasi PP TUNAS yang menunjukkan perlunya penguatan komunikasi kebijakan dan literasi digital.

Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PP TUNAS tidak hanya bergantung pada dukungan masyarakat, tetapi juga pada efektivitas sistem verifikasi usia, kesiapan platform digital, serta kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, platform media sosial, dan keluarga dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Zahriyah, A., Amanda, T. R., Fitryah, A., Nihrir, Z. Z.(2025). *Peran Badan Pusat Statistik dalam Mendukung Literasi Data Dikalangan Mahasiswa selama pandemi Covid-19 . Banyak institusi pendidikan beralih ke pembelajaran jarak jauh , memahami dinamika informasi*

yang berkembang di dunia maya . 4.

Eksekutif, R. (2025). *POLICY BRIEF*. 1–17.

Eltaher, F., & Miralles-pechuán, L. (2025). *ARROW @ TU Dublin The Digital Loophole : Evaluating the Effectiveness of Child Age Verification Methods on Social Media*.

Fahrimal, Y. (2018). *N ETIQUETTE : E TIKA J EJARING S OSIAL G ENERASI M ILENIAL DALAM M EDIA S OSIAL N ETIQUETTE : THE E THICS OF M ILLENIAL -G ENERATION SOCIAL N ETWORKS IN S OCIAL*. *2005*.

Kasus, S. (2025). *Hukum Islam dan Perlindungan Anak*. 10801–10813.

Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2010). *Parental mediation and children ' s Internet use*. https://doi.org/10.1080/08838150802437396

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.*

We Are Social. (2025). *Digital 2025: Indonesia. We Are Social & Meltwater. https://wearesocial.com/id/blog/2025/01/digital-2025*

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior (17th ed.). Pearson Education.*

Nathanson, A. I. (1999). *Identifying and explaining the relationship between parental mediation and children's aggression. Communication Research,* 26(2), 124–143. https://doi.org/10.1177/009365099026002002

Nasrullah, R. (2018). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi (Edisi ke-4). Simbiosa Rekatama Media.*

EVIDENT Institute. (2026). *Policy brief: Persepsi orang tua urban terhadap perlindungan anak di ruang digital. EVIDENT Institute.*

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.*

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Panduan literasi digital untuk sekolah dasar dan menengah. Kemendikdasmen.*

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2019). *Media use is linked to lower psychological well-being:*

Evidence from three datasets. Psychiatric Quarterly, 90(2), 311–331. *https://doi.org/10.1007/s11126-019-09630-7*

UNICEF. (2021). *Policy Guidance on AI for Children. New York:* United Nations Children's Fund.